

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMUNITAS BELAJAR DALAM
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) GURU
SEKOLAH DASAR NEGERI LANGGENG KECAMATAN
TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG**

¹Anjar Wikaningrum _ ²Ngurah Ayu Nyoman Murniati _ ³I Made Sudana
^{1,2,3}Manajemen Pendidikan , Pascasarjana, UPGRIS, Semarang
¹anjarwikaningrum38@gmail.com, ²ngurahayunyoman@upgris.ac.id
³sudana080556@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the learning community policy in the development of sustainable professionalism for teachers at Langgeng State Elementary School, Tlogomulyo District, Temanggung Regency. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that effective communication between the principal and teachers plays a crucial role in the successful implementation of the learning community. Adequate human resources, support for facilities and infrastructure, and a positive attitude of teachers towards professional development are also determining factors in the success of this program. A supportive and flexible bureaucratic structure facilitates the implementation of the policy, allowing the learning community to operate smoothly and effectively. This research is expected to contribute to the development of education in Indonesia, particularly in enhancing the quality of teaching through learning communities.

Keywords: Learning community policy, sustainable professionalism, teachers, education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan komunitas belajar dalam pengembangan keprofesionalisme berkelanjutan guru di Sekolah Dasar Negeri Langgeng, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara kepala sekolah dan guru berperan penting dalam keberhasilan implementasi komunitas belajar. Sumber daya manusia yang memadai, dukungan sarana dan prasarana, serta sikap positif guru terhadap pengembangan profesional juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program ini. Struktur birokrasi yang mendukung dan fleksibel memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, sehingga komunitas belajar dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengajaran melalui komunitas belajar.

Kata kunci: Kebijakan komunitas belajar, keprofesionalisme berkelanjutan, guru, pendidikan.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sektor penting dalam pembangunan secara keseluruhan, melalui pendidikan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diwujudkan. Untuk itu peningkatam kualitas pendidikan merupakan tuntutan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pengelola neraga. Mulyasa (2016: 8) mejelaskan bahwa untuk menyelesaikan tujuan tersebut pemerintah menetapkan strategi pokok pembangunan pendidikan nasional yaitu : pemerataan kesempatan pendidikan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Mutu pendidikan harus menjadi fokus perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hal ini karena pendidikan merupakan unsur dalam pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan sikap dan keterampilan serta memberikan pengetahuan. Dipandang dari segi sejarah, pendidikan merupakan suatu proses panjang yang membawa manusia menjadi sosok yang memiliki

kekuatan spiritual dan intelektual, sehingga memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitasnya di berbagai aspek kehidupan yang dijalani.

Implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan dimaksud. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diajukan prokondisi-prokondisi yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil yaitu model implementasi kebijakan publik Edwards III dengan mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2021:96).

Penelitian Implementasi Komunitas Belajar Dalam Keprofesionalan Guru SD Langgeng

dilakukan di SD tersebut dikarenakan keberhasilan dalam mengelola sekolah di SD Langgeng mampu memperoleh prestasi yang baik, terlihat dari capaian akreditasi sekolah yang mendapatkan predikat A pada tahun 2023 dan merupakan sekolah penggerak Angkatan ke 2 di kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Berdasarkan latar belakang penelitian yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus perhatian dan sekaligus menjadi problem adalah sejauh mana implementasi kebijakan komunitas belajar dalam pengembangan keprofesionalan guru di SD Langgeng di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yakni penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Alasan menggunakan metode ini adalah calon peneliti bermaksud mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam tentang "Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar Dalam Pengembangan Keprofesionalan Guru di SD 1 Badran".

Menurut Moleong (2016: 6), pada penelitian metode kualitatif ada beberapa prosedur yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti, mulai dari tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisa data.

Sukmadinata (2016:73) mengemukakan penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini hanya mendiskripsikan makna dan atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung

pada kemampuan dan ketajaman pelaku riset dalam menganalisisnya, artinya data yang dikumpulkan oleh peneliti bisa berupa angka ataupun data – data yang berasal dari hasil wawancara, observasi dokumentasi pribadi, catatan dan dokumen resmi lainnya.

Metode wawancara dan observasi dan juga teknik analisisnya lebih merupakan eksistensi dari perilaku manusia, seperti mendengarkan, berbicara, melihat, berinteraksi, bertanya, minta penjelasan, mengekspresikan kesungguhan dan menangkap yang tersirat (Muhajir, 2016: 80).

Pada tahap pra-lapangan yang perlu dilakukan adalah: menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian.

Pada tahap pekerjaan lapangan yang perlu dilakukan adalah: memahami latar penelitian dan persiapan diri, penampilan peneliti, pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Tahap memasuki lokasi penelitian, yang perlu dilakukan

adalah keakraban hubungan, mempelajari bahasa dan peranan peneliti. Tahap berperan serta sambil mengumpulkan data yang perlu dilakukan adalah pengarahannya, batas waktu penelitian, mencatat data, analisis di lapangan.

Berikut dikemukakan hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang menyangkut fokus penelitian, sumber data, proses pengumpulan data, studi dokumen teknik pengumpulan data, dan analisis data melalui kegiatan observasi, dokumentasi dan informasi. Data dan informasi yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis guna diketahui bagaimana implementasi kebijakan komunitas belajar dalam keprofesioanal guru SD 1 Badran. Kebaruannya dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan komunitas belajar dalam keprofesioanal guru.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, maka langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode ini ditunjukkan untuk menggambarkan

bagaimana hasil dari implementasi kebijakan komunitas belajar di SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.

1. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar

Komunikasi kebijakan dalam implementasi kebijakan sangatlah penting dalam proses implementasi kebijakan. Tanpa adanya komunikasi kebijakan maka tidak tercapai tujuan kebijakan tersebut. Edward III dalam bukunya *Implementing Public Policy*, Sutoko (2015: 8) :

Pendapat Edward III tersebut menunjukkan bahwa untuk melaksanakan implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan. Tentu saja dibutuhkan komunikasi yang tepat. Pesan dalam komunikasi kebijakan merupakan isi kebijakan yang akan disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat

mempersiapkan hal hal yang berhubungan dengan pelaksana kebijakan agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi pelaksanaan Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar di SD Negeri Langgeng, Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung juga dilakukan melalui proses transmisi melalui jalur birokrasi, informasi kebijakan disosialisasikan oleh kepala sekolah kepada semua guru di SD Negeri langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Informasi yang diberikan juga berjalan dengan konsisten terhadap guru. Implementasi akan berjalan efektif bila standar dan tujuan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan komunitas belajar.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi sudah sesuai dengan data lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi

Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar yang dilaksanakan oleh SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung sudah tersampaikan dengan baik dan jelas, hal ini memudahkan bagi sekolah dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar.

2. Sumber Daya Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan. Edward III berpendapat meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksanaan kebijakan kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan dalam implementasi, maka implementasi kebijakan sulit dilakukan.

Ketersediaan sumber daya manusia di SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan komunitas belajar cukup efektif. Jumlah guru di SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung sudah

mencukupi dan mempunyai kualifikasi pendidikan yang memadai sehingga dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar cukup baik.

Selain itu sumber daya anggaran juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar, hasil penelitian menunjukkan bahwa di SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung menggunakan BOS Kinerja untuk kebutuhan pelaksanaan komunitas belajar. Sumber daya anggaran yang berasal dari BOS kinerja dipergunakan untuk komponen administrasi, narasumber, pembuatan sertifikat dan lainnya. Besarannya 10 % dari jumlah BOS kinerja yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan sumber daya pembiayaan untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar di SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung sudah mencukupi sehingga dalam hal pembiayaan tidak menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan komunitas

belajar yang dilaksanakan di SD Negeri Langgeng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan Implementasi Komunitas Belajar di SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung sudah baik, dilihat dari ruang kelas dan fasilitas yang dimiliki SD Negeri Langgeng masih sangat layak untuk dipergunakan.

Berdasarkan ketiga aspek sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar di SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung diperoleh data hasil wawancara, yang didukung dengan hasil observasi dan juga dokumentasi yang dilakukan, sehingga dapat dinyatakan bahwa Sumber Daya untuk menunjang pelaksanaan Implementasi Komunitas Belajar sudah layak dan baik.

Dari berbagai sumber daya, yang dapat menentukan Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar adalah sumber daya kewenangan. Dalam sumber daya kewenangan

di sini yang sangat berperan adalah Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab mengatur berjalanya program Komunitas Belajar yang memiliki hak untuk menentukan keputusan dan memecahkan masalah dalam pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan teori Edward III (Chabis Wijaya, 2017: 20) bahwa kebijakan / program harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan program yang menjadi wewenangnya.

3. Disposisi pada Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar

Edward III (Chabib Wijaya & Hendra Adi Putra, 2017: 21) mengemukakan

“kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Disposisi merupakan hal krusial yang bisa menyebabkan kebijakan di

lapangan. Disposisi merupakan sikap implementor terhadap kebijakan. Dalam hal ini adalah kebijakan komunitas belajar pada SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan hasil penelitian dari kegiatan wawancara, didukung dengan hasil observasi, dan dokumentasi sudah sesuai dengan kondisi di lapangan maka dapat disimpulkan dalam aspek Disposisi, kebijakan komunitas belajar pada SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari para implementor. Koordinasi dan Kerjasama antar pelaku kebijakan sangat baik.

Begitu juga antusias, pelaksanaan komunitas belajar memerlukan antusias dari semua pihak. Dengan antusias yang dimiliki oleh sekolah SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung akan membantu proses berjalanya program. Hal ini terlihat dalam persiapan guru dalam proses komunitas belajar yang berlangsung.

Selain itu respon dari semua pihak dalam pelaksanaan komunitas belajar memberikan respon positif, program ini membawa perubahan yang baik bagi SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, terlihat dari antusias saat proses pelaksanaan dan juga hasil dari keprofesionalan guru saat memberikan praktik baik di sekolah lain.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Disposisi tentang Implementasi Kebijakan komunitas belajar di SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung sudah baik, mereka sangat mendukung kebijakan komunitas belajar, kemudian kesediaan guru dalam mengikuti komunitas belajar dalam mengembangkan keprofesionalan guru sudah baik.

4. Struktur Birokrasi pada Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar

Standar pelayanan pendidikan pada saat ini menjadi suatu yang sangat mendesak agar pendidikan dapat diberikan dengan layak sesuai dengan capaian pembelajaran. Demikian

juga satuan pendidikan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota diberikan keluasaan untuk mengambil keputusan terkait urusan pendidikan secara mandiri sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan sehingga dapat menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dengan penuh kreativitas serta bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam merealisasikan program komunitas belajar, Lembaga pendidikan dalam hal ini SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung sifatnya partisipatif dengan melibatkan semua warga sekolah. Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan PP Nomor 14 tentang guru dan dosen, peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan dan juga peraturan direktur jendral guru dan tenaga kependidikan no 6565 tahun 2020 tentang kompetensi dalam pengembangan profesi guru menjadi pedoman perencanaan penerapan implementasi kebijakan komunitas belajar dengan SK

Komunitas belajar SD Negeri Langgeng dengan Nomor 421.6/165/2024.

Berdasarkan hasil wawancara didukung oleh hasil observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar di SD Negeri Langgeng sudah baik, hal ini dibuktikan dengan pada dimensi fragmentasi birokrasi sudah adanya tim untuk menangani komunitas belajar di sekolah, selain itu prosedur teknis secara khusus sudah mengikuti aturan pemerintah pusat. Hal ini didukung dari informasi dari dinas terkait yang mendukung pelaksanaan Implementasi Komunitas Belajar di SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar Dalam Keorfesionalan Berkelanjutan (PKB) Guru SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo

Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Komunikasi Implementor Kebijakan Komunitas belajar di SD Negeri Langgeng Kecamatan Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan dengan baik, yaitu komunikasi dilakukan melalui proses transmisi melalui jalur birokrasi, informasi kebijakan disosialisasikan serta kepada semua guru di SD Negeri Langgeng, informasi yang diberikan berjalan dengan konsisten. Implementasi berjalan efektif apabila standar dan tujuan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembelajaran secara structural dan internal dengan cara sosialisasi, koordinasi dan monitoring. Sosialisasi berupa pertemuan dengan dengan guru sesuai dengan jadwal yang ditentukan berjalan dengan lancar.
2. Sumber Daya: Sumber daya dalam rangka Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar di SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung secara kuantitas sudah baik karena guru yang

terlibat disana sudah memenuhi syarat, pembiayaan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar Menggunakan Dana BOS Kinerja yang sudah dianggarkan di setiap tahunnya di ARKAS sehingga untuk pembiayaan dan sumber dana bukan menjadi masalah dalam pelaksanaan komunitas belajar. Sarana prasarana yang dimiliki SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung juga masih sangat baik dan layak digunakan.

3. Disposition: Disposisi pelaksanaan kebijakan dalam rangka Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar di SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung terlaksana dengan baik. Dilihat dari dukungan moral maupun materi daeri sekolah, sikap kooperatif terhadap kebijakan, maupun komitmen bersama. Komitemen bersama antara kepala sekolah dan guru berjalan dengan baik. Guru sebagai ujung tombak kelancaran pelaksanaan komunitas belajar bekerjasama dengan baik, memberikan praktik baik dan belajar mencari informasi

bersama di komunitas belajar yang dibentuk.

4. Struktur Birokrasi: Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Komunitas Belajar di SD Negeri Langgeng Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung sudah baik, karena melibatkan semua guru dan staf karyawan di SD Negeri Langgeng tersebut, SOP yang dibuat sudah lengkap dengan acuan prosedur teknis secara khusus sudah mengikuti aturan pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdulWahab, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi. Kebijakanaksanaan Negara, Jakarta : Pt. Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi, Suhardjono & Supardi. 2016. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Azzahra, A. 2022. "Pengaruh Media Sosial , E-Wom , Citra Merek , Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di Hotel Rancamaya". *Sinomika Jurnal*, 1(3): 481–496.
- BBPMP Jatim. 2023. Komunitas Belajar, Bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka yangKayaManfaat. <https://bbpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/komunitas-belajar-bentuk-implementasi-kurikulum-merdeka-yang-kaya-manfaat>
- Cholifah, P. S. 2017. "Profesionalisme Guru Sekolah Dasar: Membangun Komunitas Belajar Profesional Melalui Blended Learning". *Ar-Risalah*, 15(01): 1-13.
- Depdiknas. 20. Undang-undang RI No.20 tahun 20.tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Dunn, William N. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dunn, William N. 2018. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik cetakan kelima*.
- Drabcsh,Faujiah, S., Afriza, A., & Andriani, T. 2023. "Guru Profesional Sebagai Faktor Penentu Pendidikan Bermutu". *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(4): 886-895.
- Gunawan, G., & Asrifan, A. 2020. "Penerapan Kerja Kelompok Kegiatan MGMP Guru Ekonomi dalam Menyusun RPP untuk Meningkatkan Kompetensi Pedagogik". *Celebes Education Review*, 2(1): 31-36.
- Indrakusuma, Amir Daiem. 2020. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya:Usaha Nasional.
- Jasin, H. 2021. Implementasi Guru Terhadap Model Pembelajaran Daring dimasa Pandemi Covid-19 di SDN 4 Ponelo Kepulauan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*,

- <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSNPD/article/view/1052>
- Karwati, Euis dan Donni Junni Priansa. 2014. *Manajemen Kelas*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Kiriana, I. N., Widiasih, N. N. S., & Sena, I. G. M. W. 2022." Peran Guru Penggerak dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu". *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(1): 66-73.
- Komalasari, Kokom. 2014. *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Rafika Aditama.
- Kunandar. 2014. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah., & Amalia, D. 2020. "Analisis Bahan Ajar". *Nusantara: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 2(2): 311-326.
- Marimba, Ahmad D. 2020. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al Maarif.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya
- Mulyasa, E. 2016. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutiani, Mutiani. "Membangun komunitas belajar melalui lesson study model transcript based learning analysis (TBLA) dalam pembelajaran sejarah." *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 3.2 (2020): 113-122.
- Nugroho, Riant. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Rajawali Pers
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional.
(<https://peraturan.bpk.go.id/Details/175175/permendikbud-no-17-tahun2021>) Diakses pada 14 Agustus 2024.
- Ritonga, D. I. 2021. "Event Deklarasi Kepengurusan Organisasi atau Komunitas Indonesian Bass Family (IBF) Chapter Sumatera Utara Periode 2019-2024 di Kota Medan". *BAHAS*, 31(2): 82-94.
- Rusman. 2016. *Model – Model Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ruswanda, & Setiawan. 2018. *Pengaruh Profesionalisme dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di PUSJATAN (Pusat Litbang Jalandan Jembatan) Bandung*. Doctoral Dissertation, Perpustakaan FEBUNPASBandung.
- Salsabila.2024.ManfaatKomunitasBelajar.
<https://sditsalsabilabaiturrahman.sch.id/blog/manfaat-komunitas-belajar/>

- Sudjana, Nana. 2022. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suprihatiningrum, Jamil. 2014. *Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Suyanto dan Jihad, Asep. 2018. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga.
- Tafsir, Ahmad. 2021. *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rajawali Rusda Karya.
- Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Guru dan Dosen.
- Usman, M.U. 2016. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Wojowasito, S., & Tito Wasito W. 2017. *Kamus Lengkap "Inggris-Indonesia." Hasta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Yurnalis Etek. 2018. *Supervisi Akademi, Evaluasi Pengajaran*, Jakarta: PT.Transmedia.
- Zahroh, Aminatul. 2015. *Membangun Kualitas Pembelajaran Melalui Dimensi Profesionalisme Guru*. Bandung: Yrama Widya.
- Zamjani, I., & dkk. 2020. *Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud.